

**PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)**

**Oleh :
Mohammad Fajar
Pembimbing : Zulbahridar dan Pipin Kurnia**

*Faculty of Economics and Business, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : pnagato33@yahoo.co.id*

*The Effect of Profitability, Leverage, and Corporate Governance on Tax Avoidance
(Empirical Study on Manufacturing Companies
Listed In Indonesia Stock Exchange Period 2012-2014)*

ABSTRACT

The aim of this study was to examine the effect of Profitability, Leverage, and Corporate Governance to Tax Avoidance in Manufacturing Company Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2012-2014. The population are all LQ45 companies in Indonesia still operation during the years 2012-2014. Based on specified criteria, the company earned 68 were used as samples in this study. Sample selection by using purposive sampling method. This study uses secondary data such as financial statements and methods of data analysis using multiple linear regression analysis. The conclusions is: Profitability and Leverage effect on Tax Avoidance. The Institutional Ownership, the proportion of independent commissioners' board, and Audit Committee do not effect on the Tax Avoidance.

Keywords : Profitability, Leverage, Corporate Governance and Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan yang baik dari perusahaan. Hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang

besar dan kontinyu yang bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pajaknya, baik secara legal maupun illegal.

Minimalisasi pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak ini disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Meminimalkan kewajiban pajak yang

tidak melanggar undang-undang sering di sebut dengan *Tax Avoidance*. Praktik *Tax Avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan (Sari, 2014).

Sebelumnya, perlu dipahami apa itu pengertian penghindaran pajak. Menurut Zain (2008: 50) penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Penelitian ini menggunakan lima variabel yakni: Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agusti (2014) yang berjudul pengaruh *profitabilitas*, *leverage* dan *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance*. Pada penelitian tersebut *corporate governance* diukur menggunakan proporsi dewan komisaris independen. Hasil dari penelitian Agusti (2014) adalah *profitabilitas* dan *corporate governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Perbedaan dari penelitian sebelumnya

adalah sebagai berikut: 1) Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 sedangkan Agusti (2014) melakukan penelitian pada periode 2009-2012 dengan harapan hasil penelitian ini menjadi lebih aktual dibandingkan dengan penelitian sebelumnya; 2) Variabel *corporate governance*, dengan menambahkan mekanisme kepemilikan institusional dan Komite Audit yakni variabel yang digunakan oleh Handayani, dkk (2015) yang diduga mempengaruhi *Tax Avoidance*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah *Profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*? 2) Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*? 3) Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*? 4) Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*? 5) Apakah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*? 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*? 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*? 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*? 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*?

TELAAH PUSTAKA

Tax Avoidance

Menurut Zain (2008: 50) penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam

batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Suandy (2008: 7) penghindaran pajak adalah rekayasa 'tax affairs' yang masih tetap berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2010) jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan terdiri dari margin laba atas penjualan, ROA, ROE dan laba perlembar saham. Dalam penelitian ini hanya menggunakan proksi ROA. *Return On Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak

penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Nilai ROA perusahaan dapat dilihat dari laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Perusahaan yang memiliki ROA yang lebih rendah cenderung melakukan *Tax Avoidance*. Jika aset meningkat, maka beban akan bertambah melalui beban penyusutan dan pajak pun dapat terhindar, karena semakin tinggi beban maka laba akan semakin kecil dan nilai ROA ikut mengecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) yang menyatakan bahwa jika ROA mengalami peningkatan maka aktivitas *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. Semakin rendah ROA perusahaan maka beban pajak juga menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Oleh karena itu makin rendah ROA, maka akan makin besar kemungkinan atau potensi perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*.

Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Leverage adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga (Rachmithasari, 2015)

Salah satu alasan keuntungan dari hutang adalah sifat bunga yang dapat mengurangi pajak (Subramanyam dan Wild, 2014:266). Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha yang akan menjadi pengurang laba dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.

Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi bunga yang dihasilkan oleh hutang tersebut, maka akan semakin besar keuntungan yang di peroleh perusahaan berupa pengurangan laba atas hutang dan bunga sehingga semakin tinggi tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan (Marfu'ah, 2015).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suyanto (2012) yang memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengajanya perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan *Tax Avoidance*. Jadi semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan akan menyebabkan tingkat *Tax Avoidance* yang tinggi juga.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Pada setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik-konflik antara pihak-pihak yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Maka dari itu didalam perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Wien, 2010).

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional umumnya bertindak

sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *Corporate Governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Adanya kepemilikan oleh investor-investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain dalam bentuk perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial. Menurut penelitian yang dilakukan Khurana (2009) menyatakan besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Meiza (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan Komisaris Independen adalah seseorang tidak terafiliasi dalam hal apapun dengan pemegang saham, direksi dan komisaris, serta tidak

menjabat sebagai direktur suatu perusahaan. Komisaris Independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait, dan diharapkan dapat mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif sehingga dapat mencegah tindakan *Tax Avoidance* yang akan dilakukan manajemen (Handayani, Haris dan Mujiyati, 2015)

Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi biaya-biaya termasuk pajak, dengan begitu manajemen akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. (Wulandari, 2005). Namun dengan adanya dewan komisaris independen hal tersebut dapat dihindari, karena komisaris independen dapat melakukan fungsi pengawasan yang baik terhadap kinerja manajemen. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan (Prakosa, 2014).

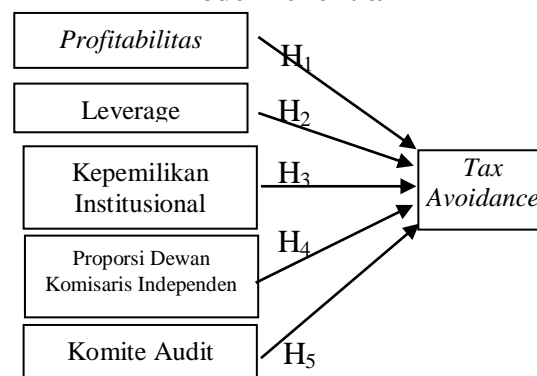
Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam menerapkan *corporate governance*, keberadaan komite audit sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efektivitas auditor internal dan eksternal. Menurut Dhaliwal (2003) dalam Reza (2012) frekuensi rapat ikut menentukan kuatnya *corporate governance* dalam komite audit. Beasley et al. (2004)

dalam Pamudji dan Trihartati (2008) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit lebih sedikit pada perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan, jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Pada *agency theory* dijelaskan bahwa dapat terjadi keadaan dimana salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi sehingga menimbulkan kondisi asimetri informasi. Hal ini terjadi dalam praktik *Tax Avoidance* yaitu agen memiliki lebih banyak informasi daripada *principal* yang salah satunya dapat disebabkan oleh hubungan antara agen dan *principal*. Semakin sering komite audit melakukan rapat, maka diduga terdapat kemungkinan untuk mendiskusikan upaya-upaya *Tax Avoidance* dalam rangka tujuan tertentu dari agen. Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi antara pihak *principal* dan agen.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.
Model Penelitian



Sumber : Data Olahan, 2018

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat ditarik hipotesis yang dapat diuji sebagai berikut:

- H₁: Profitabilitas Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*
- H₂: Leverage Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*
- H₃: Kepemilikan institusional Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*
- H₄: Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*
- H₅: Komite Audit berpengaruh pada *Tax Avoidance*

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 yang berjumlah 136 perusahaan Teknik sampling dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

1. Terdaftar sebagai perusahaan manufaktur di BEI (2012-2014)
2. Perusahaan terus menerus melaporkan laporan keuangannya dari tahun 2012 sampai 2014.
3. Perusahaan yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2012-2014.
4. Perusahaan yang menyampaikan data secara lengkap selama tahun 2012-2014 berkaitan dengan dewan komisaris, kepemilikan institusional dan jumlah saham beredar.
5. Perusahaan yang tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan (2012-2014)

Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam rupiah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dari dokumentasi. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari enam variabel yaitu:

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2008: 135). Rumus ROA:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba (Rugi) Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage perusahaan

Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang (Fahmi, 2012:62). *Leverage* diukur dengan rumus DER sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Jumlah utang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi seperti perusahaan, perusahaan asuransi dan kepemilikan oleh institusi lain dalam bentuk perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Rumus Kepemilikan Institusional:

$$KI = \frac{\text{Proporsi saham yang dimiliki pihak institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

Proporsi Dewan Komisaris Independen

omisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan (Handayani, Haris dan Mujiyati, 2015). Rumusnya adalah:

$$PDKI = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Sumber: (Husnan, 2006).

Komite Audit

Komite audit berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM Kep. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan

perusahaan. Komite Audit diukur dengan Jumlah anggota komite audit.

Tax Avoidance

Menurut Zain (2008: 50) penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Rumusnya adalah:

$$TACETR_{it} = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{it}}{\text{Pre Tax Income}_{it}}$$

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Metode analisis dilakukan menggunakan data kuantitatif untuk memperhitungkan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Model dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

- Y = Tax Avoidance
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X₁ = Profitabilitas
- X₂ = Leverage
- X₃ = Kepemilikan Institusional
- X₄ = Proporsi Dewan Komisaris Independen
- X₅ = Komite Audit

Dalam penelitian ini digunakan alat bantu *computer* program SPSS 16.0. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka sebelum melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berikut ini adalah uraian perkembangan variabel penelitian selama periode penelitian tahun 2012 – 2014:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

| | N | Min | Max | Mean |
|-------------------------------|-----|------|-------|---------|
| ROA | 204 | .04 | 71.51 | 10.6858 |
| DER | 204 | .08 | 7.40 | .9179 |
| Kepemilikan Institusional | 204 | .00 | 99.00 | 68.5528 |
| Proporsi Komisaris Independen | 204 | .00 | 1.00 | .3622 |
| Komite Audit | 204 | .00 | 5.00 | 2.9853 |
| Tax Avoidance | 204 | .001 | 7.495 | .46416 |
| Valid N (listwise) | 204 | | | |

Sumber : Data Olahan, 2018

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diatas dapat dilihat bahwa nilai *Tax Avoidance* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,464 dan standar deviasi sebesar 0,733. *Tax Avoidance* terkecil adalah 0,001 yakni PT Akasha Wira International Tahun 2012 sedangkan *Tax Avoidance* terbesar adalah 7,495 yakni PT Sierad Produce Tbk Tahun 2013.

Return on Asset menunjukkan nilai minimum sebesar 0,04 yakni PT Star Petrochem Tbk Tahun 2014 dan nilai maximum 71,51 yakni PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2013. Rata-rata *Return on Asset* dalam penelitian ini sebesar 10,685 dengan standar deviasi 10,858. Hal ini berarti rata-rata perusahaan memiliki kemampuan mengelola aset dan menciptakan laba sebesar 10,685% dari total aset.

Debt to Equity Ratio menunjukkan nilai minimum sebesar 0,08 yakni PT Intanwijaya Internasional Tbk Tahun 2013 dan nilai maximum 7,40 yakni PT Jembo Cable Company Tbk Tahun

2013. Rata-rata *Debt to Equity Ratio* dalam penelitian ini sebesar 0,9179 dengan standar deviasi 0,922. Hal ini berarti rata-rata perusahaan memiliki kemampuan melunasi 91,79% hutangnya dariseluruh ekuitas yang dimiliki.

Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 yakni PT Intanwijaya Internasional Tbk Tahun 2013 dan nilai maximum 99% yakni PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk Tahun 2014. Rata-rata Kepemilikan Institusional dalam penelitian ini sebesar 68,5528% dengan standar deviasi 19,808%. Hal ini berarti Rata-rata Kepemilikan Institusional pada perusahaan sampel tergolong cukup tinggi karena diatas 50% dari total kepemilikan.

Proporsi Komisaris Independen menunjukkan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maximum 1,00 yakni PT Arwana Citramulia Tbk Tahun 2014. Rata-rata Proporsi Komisaris Independen dalam penelitian ini sebesar 0,3622 dengan standar deviasi 0,148. Hal ini berarti Rata-rata 36,22% Komisaris pada perusahaan sampel merupakan Komisaris Independen.

Komite Audit menunjukkan nilai minimum sebesar 0 dan nilai maximum 5 orang. Rata-rata Komite Audit dalam penelitian ini sebesar 2,98 \approx 3 orang dengan standar deviasi 2,985. Hal ini berarti Rata-rata Komite Audit pada perusahaan sampel telah memenuhi peraturan yang diterbitkan Bapepam yakni 3 orang.

Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 204 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .69647632 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .274 |
| | Positive | .274 |
| | Negative | -.207 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .698 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .714 |

Sumber : Data Olahan, 2018

Tabel 2 menjelaskan hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov, karena nilai Asymp. Sig 0,714 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian model regresi diperoleh nilai-nilai VIF untuk masing-masing variabel ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinerineritas

| Model | Collinearity Statistics | |
|---------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 ROA | .877 | 1.140 |
| DER | .877 | 1.140 |
| Kepemilikan Institusional | .920 | 1.087 |
| Proporsi Komisaris | .946 | 1.057 |
| Komite Audit | .894 | 1.118 |

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua nilai VIF dari variabel bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari 10. Hasil pengujian model regresi tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinier dalam model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

| Model | Durbin-Watson |
|-------|---------------|
| 1 | 2.209 |

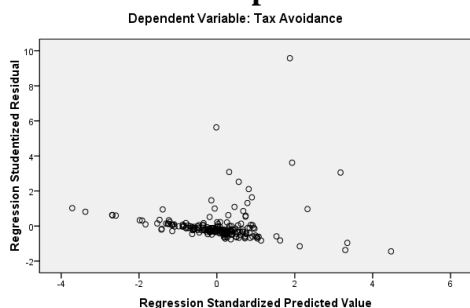
Sumber : Data Olahan, 2018

Dari Tabel 4 di atas dapat terlihat nilai Durbin-Watson sebesar 2,209. Oleh karena nilai *dw* (2,209) lebih besar dari 4-du ($4 - 1,809 = 2,191$) dan lebih kecil dari 4-dl ($4 - 1,728 = 2,272$), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi negatif.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas:

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplots



Sumber : Data Olahan, 2018

Dengan grafik *scatterplots* pada Gambar 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian model regresi secara parsial diperoleh sebagai berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
|---------------------------|-----------------------------|------|---------------------------|
| | B | Std. | Beta |
| 1 (Constant) | .020 | .309 | |
| ROA | -.013 | .005 | -.198 |
| DER | .134 | .057 | .168 |
| Kepemilikan Institusional | .001 | .003 | .028 |
| Proporsi Komisaris | .624 | .343 | .126 |
| Komite Audit | .056 | .068 | .059 |

Sumber : Data Olahan, 2018

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 0,020 - 0,013X_1 + 0,134X_2 + 0,001X_3 + 0,624 X_4 + 0,056 X_5$$

Dari model di atas diketahui:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,020 artinya *Tax Avoidance* akan bernilai sebesar 0,020 apabila seluruh variabel independen dianggap bernilai nol.
2. Nilai koefisien regresi X_1 (b_1) sebesar -0,013, artinya *Return on Asset* memiliki pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* sebesar 0,013. Apabila *Return on Asset* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0,013. Begitu juga sebaliknya, Apabila *Return on Asset* mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka *Tax Avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0,013.
3. Nilai koefisien regresi X_2 (b_2) sebesar 0,134, artinya *Debt to Equity Ratio* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* sebesar 0,134. Apabila *Debt to Equity Ratio* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka *Tax Avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,134. Begitu juga sebaliknya, Apabila *Debt to Equity Ratio* mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka *Tax Avoidance* akan meningkat penurunan sebesar 0,134.

4. Nilai koefisien regresi X_3 (b_3) sebesar 0,001, artinya Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* sebesar 0,001. Apabila Kepemilikan Institusional mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka *Tax Avoidance* akan mengalami meningkat sebesar 0,001. Begitu juga sebaliknya, Apabila Kepemilikan Institusional mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka *Tax Avoidance* akan penurunan sebesar 0,001.
5. Nilai koefisien regresi X_4 (b_4) sebesar 0,624, artinya Proporsi Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* sebesar 0,624. Apabila Proporsi Komisaris Independen mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka *Tax Avoidance* akan mengalami meningkat sebesar 0,624. Begitu juga sebaliknya, Apabila Proporsi Komisaris Independen mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka *Tax Avoidance* akan penurunan sebesar 0,624.
6. Nilai koefisien regresi X_5 (b_5) sebesar 0,056, artinya Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* sebesar 0,056. Apabila Komite Audit mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka *Tax Avoidance* akan mengalami meningkat sebesar 0,056. Begitu juga sebaliknya, Apabila Komite Audit mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka *Tax Avoidance* akan penurunan sebesar 0,056.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian signifikansi variabel bebas secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis

| Model | t | Sig. |
|-------------------------------|--------|------|
| 1 (Constant) | .065 | .948 |
| ROA | -2.744 | .007 |
| DER | 2.331 | .021 |
| Kepemilikan Institusional | .399 | .691 |
| Proporsi Komisaris Independen | 1.820 | .070 |
| Komite Audit | .825 | .410 |

Sumber : Data Olahan, 2018

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh *Return on Asset* Terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa koefisien regresi variabel *Return on Asset* adalah -0,013. Dengan nilai signifikansi variabel *Return on Asset* sebesar $0,007 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan ini maka bisa disimpulkan bahwa *Return on Asset* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Darmawan dan Sukharta (2013) bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik salah satunya dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya serta memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Maharani dan Suardana (2014) serta Darmawan dan Sukartha (2014) menemukan hasil bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa koefisien regresi variabel *Debt to Equity Ratio* adalah 0,134. Dengan nilai signifikansi variabel *Debt to Equity Ratio* sebesar $0,021 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan ini maka bisa disimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Artinya semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai leverage maka tindakan *Tax Avoidance* perusahaan akan semakin tinggi. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

Hasil Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) dan Budiman & Setiyono (2011) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional adalah 0,001. Dengan nilai signifikansi variabel Kepemilikan Institusional sebesar $0,691 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Dengan ini maka bisa disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Proporsi kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Avoidance*,

memiliki arti bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Diantara dan Ulupui (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peran penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan praktik *Tax Avoidance*. Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *Tax Avoidance* terjadi. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Fadhilah (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Khurana dan Moser (2009), serta Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa koefisien regresi variabel Proporsi Komisaris Independen adalah 0,624. Dengan nilai signifikansi variabel Proporsi Komisaris Independen sebesar $0,070 > 0,05$, maka H_0 diterima

dan H_4 ditolak. Dengan ini maka bisa disimpulkan bahwa Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan kinerja manajemen dimana semakin besar proporsi komisaris independen maka pengawasan menjadi lebih ketat untuk pihak manajemen. Ketatnya pengawasan akan membuat manajemen bertindak lebih waspada untuk menentukan keputusan dan transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014)

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berarti proporsi komisaris independen yang besar di dalam perusahaan tidak efektif dalam upaya pencegahan praktik penghindaran pajak. Kemungkinan peran komisaris independen dalam mekanisme *corporate governance* tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam pengambilan keputusan pajak di perusahaan. Temuan ini membuktikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arsi dan Suardana (2016), Maria dan Kurniasih (2013), Agusti (2014), Fadhilah (2014) serta Annisa dan Kurniasih (2012).

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa koefisien regresi variabel Komite Audit adalah 0,056. Dengan nilai signifikansi variabel Komite Audit sebesar $0,410 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_5 ditolak. Dengan ini maka bisa disimpulkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Komite audit sesuai perannya dapat membantu dewan komisaris agar asimetri informasi tidak terjadi, dengan melakukan monitoring serta memberi pertimbangan kepada manajemen pada pengendalian intern yang sedang berlangsung di dalam perusahaan. Informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif dari pihak manajemen akan terjadi jika pengawasan semakin ketat dilakukan pada manajemen perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013). Singly dan Sukartha (2015) menyatakan komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris dalam melakukan yang menuntut maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan yang salah satunya adalah penghematan pajak berupa *Tax Avoidance*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hasil penelitian yang tidak berpengaruh dimungkinkan pada perhitungan statistik deskriptif masih terdapat perusahaan yang hanya mempunyai 2 anggota komite audit, padahal BEI memberi syarat paling sedikit komite audit harus tiga orang, kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI (Pohan, 2008), jadi jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Hasil penelitian ini sejalan dengan Eksandy (2017) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .314 ^a | .099 | .076 | .705215 |

Sumber : Data Olahan, 2018

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. Dari tampilan output SPSS menunjukkan besarnya *Adjusted R²* model regresi adalah 0,076, hal ini berarti *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, *Debt to Equity Ratio* dan *Return on Asset* sebesar 7,6% sedangkan sisanya (100% - 7,6% = 92,4%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan.
2. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan.
3. *Corporate Governanace* yang diukur dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan.

4. *Corporate Governanace* yang diukur dengan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama disebabkan masih kurang optimalnya fungsi komisaris independen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dan penyebab yang kedua adalah komisaris independen hanya bisa mengawasi kinerja manajemen akan tetapi yang mengambil keputusan tetaplh manajemen itu sendiri, wewenang komisaris independen tidak bisa secara langsung mengurangi keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*.
5. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Alasan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap aktivitas *Tax Avoidance* yaitu apabila perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang banyak dan lebih baik terhadap KAP tersebut, maka bisa saja KAP yang bereputasi baik melakukan tindakan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka seperti kasus Enron tahun 2004.
6. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0,379. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 37,9 %.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan saran:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan. Sebaiknya peneliti selanjutnya menambah

variabel penelitian karena masih banyak faktor-faktor yang berkontribusi dalam mempengaruhi *Tax Avoidance* seperti variabel komite audit, ukuran perusahaan, risiko perusahaan, karakter eksekutif, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik.

2. Bagi Pemerintah/Regulator, sebaiknya pemerintah/regulator membuat kebijakan perpajakan yang tidak memberatkan perusahaan sehingga dapat mencegah perusahaan tidak melakukan *Tax Avoidance*.
3. Bagi perusahaan manufaktur agar lebih teliti dalam mengambil keputusan yang terkait dengan perencanaan pajak terutama mengenai *Tax Avoidance*.
4. Bagi masyarakat/investor, sebaiknya dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengkaji terlebih dahulu bagaimana kinerja suatu perusahaan dan tetap mematuhi peraturan tentang perpajakan, penghindaran pajak bukan hal yang wajar tetapi selalu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Agusti, Wirna Yola. 2014. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal*. Universitas Negeri Padang.

Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus, Kurnasih. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 8/No. 2*. 95-199. Semarang. Universitas Muhammadiyah Semarang.

Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*,

Return On Assets Dan Ukuran Perusahaan Pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.1 (2014): 143-161*. Bali. Universitas Udayana.

Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Handayani, Cahyaning Dewi, Aris, Muhammad Abdul & Mujiyati. 2015. Pengaruh Return On Assets, Karakteristik Eksekutif Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap *Tax Avoidance*. *Seminar Nasional dan The 2nd Call For Syariah Paper*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* Terhadap ETR. *Jurnal*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Hardika, Nyoman Sentosa. 2007. Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. Volume 3 No.2.103-112*. Bali. Politeknik Negeri Bali.

Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Khurana, I.K., dan W.J. Moser. 2009. Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *Unpublished working paper*. Amerika. University of Missouri.

- Kurniasih, Tommy & Sari, Maria M. Ratna. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No. 1, Februari 2013*. Bali. Universitas Udayana.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya & Suardana, Ketut Alit. 2014. Pengaruh Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2 (2014): 525-539*. Bali. Universitas Udayana.
- Marfu'ah, Laila. 2015. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh *Corporate Governace*, Rasio Tobin Q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal*. Jakarta. Universitas Trisakti.
- Prakosa, K. B. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia*.
- Rachmithasari, Annisa Fadilla. 2015. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sari, Gusti Maya. 2014. Analisis Pengaruh Corporate Governance, ukuran perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal*. Padang. Universitas Negeri Padang.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, KR & Wild, John J. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Suyanto, Krisnata Dwi. 2012. Likuiditas, Leverage, Manajemen laba, Komisaris Independen, terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.2*, hlm.167-177.
- Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.